



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Kapten Cok Agung Tresna I No.1
Telp. (0361) 224436, 227730 Fax. (0361) 222436
Denpasar (Bali), 80235

RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2024



DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI BALI

KATA PENGANTAR

Atas Asung Kertha Waranugraha dan dengan mengucapkan Puja Astuti Anghayu Bagia kehadapan Ida Sanghyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa Karena atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tahun 2024 merupakan Rencana Kerja Tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Bali tahun 2024-2026 yang mengacu pada RPD Semesta Berencana Provinsi Bali 2024-2026, sehingga pembangunan dibidang transportasi yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan terukur baik kuantitatif maupun kualitatif. Keberhasilan akan dapat dicapai, apabila dalam melaksanakan program/kegiatan pemerintah dan pembangunan, mempunyai acuan yang jelas dan mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja ini belum sempurna karena keterbatasan dalam penyusunan nya, untuk itu diharapkan masukan dari berbagai pihak sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan yang direncanakan.

Bali, 19 Juli 2023

Kepala Dinas Perhubungan Prov. Bali



IGW. Gausi Gunarta
Pembina/Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650807 199603 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum	8
1.3 Maksud dan Tujuan.....	11
1.4 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN	
LALU	13
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun	
Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	13
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.3 Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	
Perangkat Daerah.....	17
2.4 Reviuw terhadap Rancangan Akhir RKPD	18
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	19
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	20
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	20
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	20
3.3 Program dan Kegiatan.....	23
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	30
4.1 Rencana Kerja Program Perangkat Daerah.....	30
BAB V. PENUTUP	35
5.1 Catatan Penting	35
5.2 Kaidah – kaidah Pelaksanaan	35
5.2 Rencana Tindaklanjut	36
Lampiran	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan semakin berkembangnya paradigma baru dalam kehidupan sosial politik, ekonomi di masyarakat, menuntut adanya perubahan penyelenggaraan manajemen pemerintahan dan pembangunan, menuju sistem pemerintahan yang baik dalam arti berdaya guna, berhasil guna, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta penegakan demokrasi dan keadilan (*Good Governance*).

Tuntutan cita-cita luhur tersebut akan dapat diwujudkan, apabila seluruh jajaran aparatur pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan dan pembangunan memiliki akuntabilitas kinerja yang baik dalam arti arah kebijakan dan program/kegiatan yang akan dilaksanakan mempunyai rencana maksud, tujuan yang jelas dan terarah, legalitas kewenangan, indikator sasaran yang terukur, serta dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab dalam arti bermanfaat bagi kepentingan publik.

Transportasi merupakan urat nadi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, mempunyai fungsi penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan, dimana dalam penyelenggaraannya banyak elemen yang terkait seperti sarana, prasarana, pergerakan, sertifikasi, kelaikan, perambuan, kenavigasian, sumber daya manusia, geografi, demografi dan lainnya.

Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh peran sektor transportasi, sehingga sistem transportasi harus terus dibina, agar mampu menghasilkan jasa transportasi yang handal, berkemampuan tinggi dan diselenggarakan secara terpadu, tertib, lancar, aman, nyaman dan efisien dalam menunjang sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan; mendukung mobilitas barang dan jasa; mendukung pola distribusi nasional serta

mendukung pengembangan wilayah, meningkatkan hubungan antar wilayah, nasional dan internasional dalam perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian pembangunan transportasi perlu terus dimantapkan dan dikembangkan sejalan dengan tuntutan kualitas pelayanan dan meningkatnya kebutuhan mobilitas barang dan jasa agar mampu menunjang pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi masyarakat daerah dan stabilitas nasional.

Adanya isu – isu strategis yang berkembang dalam sektor perhubungan antara lain :

- a. Terjadinya Kemacetan lalu lintas terutama di daerah Kawasan Sarbagita dan Pusat-pusat kegiatan wisata;
- b. Tingginya kejadian kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia di Provinsi Bali;
- c. Masih rendahnya penggunaan angkutan umum;
- d. Masih terbatasnya kapasitas layanan prasarana transportasi (Bandara, Pelabuhan, Jalan, dan Terminal); dan
- e. Terbatasnya pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi yang handal dan terintegrasi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, mewujudkan keseimbangan pembangunan serta konektivitas antar wilayah.

Berkenaan dengan pembangunan daerah, telah digariskan bahwa apa yang menjadi visi-misi daerah harus selaras dengan visi-misi pembangunan nasional (RPJMN 2020-2024). Dalam pandangan pemerintah pusat terhadap pembangunan daerah, bahwa visi dari pembangunan daerah adalah terwujudnya kapasitas daerah yang maju dengan masyarakat yang mandiri. Sedangkan misi pembangunan daerah adalah: (1) memantapkan otonomi daerah dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan; (2) mempercepat pengembangan wilayah dengan mengutamakan peningkatan daya saing sebagai dasar pertumbuhan daerah; (3) pemerataan antar daerah; (4) pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan; (5)

meningkatkan kapasitas masyarakat dengan memberikan hak kepada masyarakat untuk pengembangan diri, meningkatkan akses informasi kepada masyarakat dengan memberi hak informasi untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya; serta (6) mempercepat penyelesaian masalah sosial, ekonomi, politik serta hukum di beberapa daerah.

Memperhatikan berbagai uraian tersebut di atas secara umum memiliki kesamaan dengan arah pembangunan daerah Provinsi Bali dengan Visi Pembangunan Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui pola pembangunan semesta berencana dengan 5 (lima) bidang prioritas pembangunan Bali yaitu: (1) Bidang sandang dan pangan; (2) Bidang kesehatan dan pendidikan; (3) Bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan; (4) Bidang adat, agama, tradisi, seni dan budaya dan (5) Bidang pariwisata. Untuk mewujudkan kelima bidang tersebut transporsai mempunyai peran yang sangat penting sebagai urat nadi pembangunan di Provinsi Bali yaitu dengan didukung dengan pembangunan infrastruktur bidang perhubungan darat, laut dan udara secara teriteraksi dan terkoneksi. Kelima prioritas pembangunan tersebut dipadukan dalam kerangka vitalisasi dan aktualisasi melalui pelaksanaan strategi, seperti peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan publik yang sulit terlaksana tanpa diimbangi oleh peningkatan kualitas SDM.

Melakukan pembangunan dan pengembangan Infrastruktur, strategi ini merupakan upaya untuk mendukung capaian sasaran yang akan dilakukan pada Tujuan 5 Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 yakni “Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut, dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi”. Salah satu pijakan utama strategi ini adalah berkaitan dengan permasalahan utama pembangunan ekonomi Bali yang masih belum merata, sehingga masih terdapat ketimpangan pembangunan antar wilayah utara, selatan, dan barat serta timur Bali. Pengembangan dan peningkatan infrastruktur yang baik

diseluruh kawasan/wilayah Bali, diharapkan akan dapat mempercepat pembangunan ekonomi terutama potensi-potensi yang ada di pelosok-pelosok pedesaan atau di pusat-pusat ekonomi kerakyatan yang ada di daerah di Provinsi Bali.

Strategi dan arah kebijakan yang dilakukan secara khusus di sektor transportasi, strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah di Provinsi Bali perlu pula mengakomodir program – program yang selaras dengan Pemerintah Pusat. Selain itu perlu pula mengakomodir program – program dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang perhubungan daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2013.

Untuk menunjang strategi dan arah kebijakan maka urusan perhubungan melaksanakan :

- 1) Pengembangan dan preservasi jaringan jalan dan jembatan dalam mendukung aktivitas pengguna jalan;
- 2) Peningkatan perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan serta peningkatan kendaraan yang berkeselamatan dalam rangka menekan tingkat kecelakaan lalu lintas;
- 3) Revitalisasi angkutan umum, penyediaan angkutan umum yang berkualitas khususnya di daerah perkotaan dalam mengurangi kemacetan;
- 4) Optimalisasi Manajemen rekayasa lalu lintas dan penyediaan serta pemeliharaan fasilitas keselamatan di jalan raya dalam mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan pergerakan lalu lintas untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
- 5) Pembangunan/pengembangan/peningkatan prasarana dan fasilitas perhubungan dalam mendukung keseimbangan dan konektivitas wilayah;
- 6) Penataan jaringan transportasi darat, laut dan udara antar kabupaten/kota.

Untuk memenuhi tuntutan tersebut, Dinas Perhubungan Provinsi Bali menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 mengacu pada RKPD Dinas Perhubungan Provinsi Bali tahun 2024, yang merupakan turunan dan pelaksanaan dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Bali yang telah menyesuaikan dan mengacu pada RPD Provinsi Bali tahun 2024 - 2026 serta mengacu pada pelaksanaan Undang-Undang No 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6267);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029;

13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2018-2023;
16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Bali;
17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 100 Tahun 2017 tentang Pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja unit pelaksana teknis daerah di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Bali;
18. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan Kepada Pemimpin Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan tentang Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Akhir Perangkat Daerah Tahun 2024 Dinas Perhubungan Provinsi Bali adalah untuk melaksanakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun anggaran yang diselaraskan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta dokumen perencanaan di atasnya yakni RPD Semesta Berencana 2024-2026 dan Renstra. Renja disusun juga untuk menggambarkan secara umum capaian kinerja yang ingin dicapai untuk dapat ditransformasikan ke dalam Renja Akhir PD dan Rencana Kerja Anggaran PD.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja adalah:

1. Menyelaraskan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen RPD dan Renstra;
2. Mendeskripsikan tentang program/kegiatan baik prioritas maupun non prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Perangkat Daerah dalam 1 tahun anggaran;
3. Menghasilkan kinerja yang baik dan alokasi anggaran yang tepat sasaran serta akuntabel.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan capaian Renstra PD
	2.2 Analisa Kinerja Pelayanan PD
	2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD
	2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD
	2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
	3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
	3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV	RENJA DAN PENDANAAN PD
BAB V	PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
(TAHUN 2022)

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan a. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020.

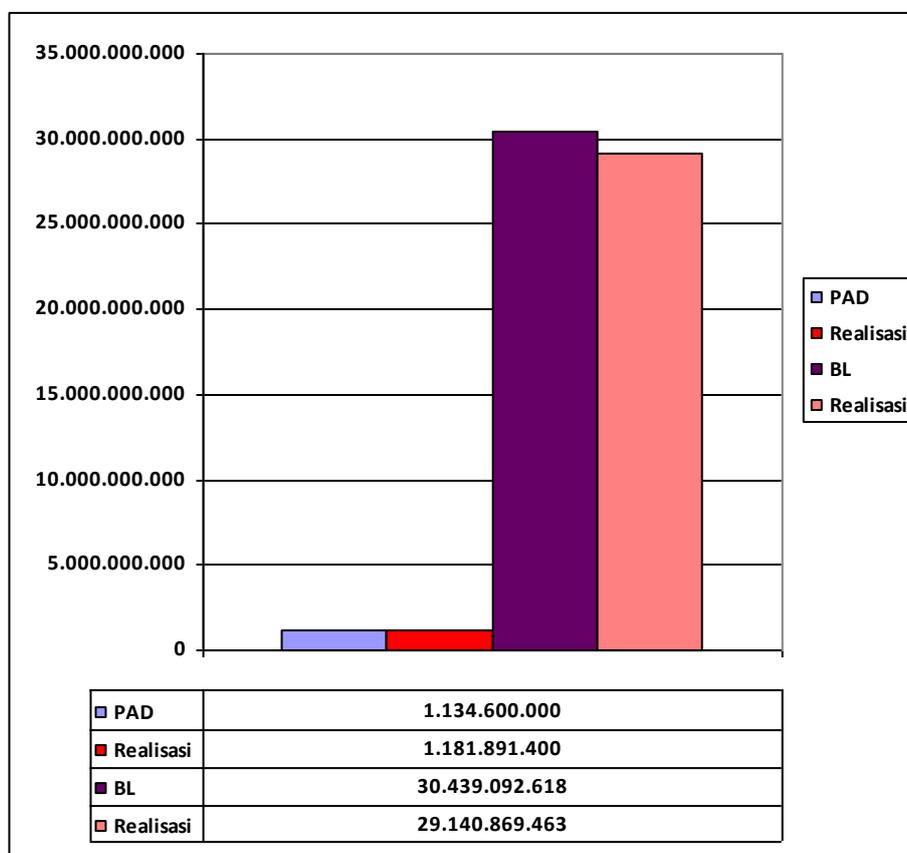
Pada tahun anggaran 2022 Dinas Perhubungan Provinsi Bali melaksanakan 4 Program dan 15 kegiatan yang tersebar di seluruh Bidang dan UPTD. yang ada di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Bali.

Berdasarkan tabel monitoring realisasi fisik dan keuangan kegiatan yang ada di Dinas Perhubungan Provinsi Bali per Desember tahun 2022 maka secara keseluruhan dapat kami laporkan Keuangan terealisasi sebesar 95,73% dari target 100%, Fisik terealisasi sebesar 100 % dari target sebesar 100%. Dari keseluruhan nilai rencana anggaran Tahun 2022 sebesar Rp. 30.439.092.618,- terealisasi sebesar Rp. 29.140.860.463,- dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.298.232.155,-. Menurut laporan realisasi fisik dan keuangan dana APBD Periode Triwulan IV Tahun 2022 Dinas Perhubungan Provinsi Bali (terlampir), keseluruhan pelaksanaan Renja tahun lalu dapat berjalan dengan baik.

**REKAPITULASI SEBARAN BELANJA LANGSUNG
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI DALAM APBD TAHUN 2022**

No.	Bidang/UPTD	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Sekretariat	1	6	20.235.786.282
2	Bidang Angkutan	1	1	529.018.468
3	Bidang Pelayaran	1	1	1.598.937.510
4	Bidang Lalu Lintas	1	2	798.815.572
5	Bidang Keterpaduan Moda	1	1	217.150.340
6	UPTD. Pusat Pengendalian LLAJ	2	4	849.362.620
7	UPTD. Trans Bali / Trans Sarbagita	2	4	4.759.537.288
8	UPTD. Perlengkapan Jalan	2	3	901.376.658
9	UPTD. Penyelenggaraan Pelabuhan	2	6	549.107.880
JUMLAH			28	30.439.092.618

Target dan Realisasi PAD, dan BL Dinas Perhubungan Prov. Bali Tahun 2022



Walaupun dalam laporan pencapaian target menunjukkan kondisi yang baik/ideal bukan berarti tidak terjadi permasalahan. Terdapat beberapa target yang tidak tercapai seperti penurunan target pendapatan, capaian kinerja dan lainnya yang perlu untuk disampaikan dan dianalisa. Beberapa faktor yang berpengaruh dapat disampaikan sebagai berikut;

- Pencapaian Target Pendapatan cukup jauh dari target yang disusun, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yakni menurunnya pendapatan tiket bus Trans Sarbagita karena adanya kebijakan tiket gratis bagi pengguna pelajar/mahasiswa. Selain itu penurunan jumlah penumpang umum juga turut berdampak. Selain pendapatan Trans Sarbagita, pungutan retribusi Kartu Pengawasan juga mengalami sedikit penurunan jumlah pengurusan.
- Pencapaian Target Kinerja
Beberapa Target Kinerja menunjukkan data tidak tercapai sesuai target yang diharapkan. Adapun beberapa faktor yang berpengaruh sebagai berikut;
 - a. Tidak tercapainya target indikator Persentase penerapan manajemen keselamatan di pelabuhan pengumpan regional. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2022 belum dilakukan pengambilalihan operasional pelabuhan pengumpan regional. Sehingga target 100% belum dapat dilakukan pengukuran.
 - b. Tidak tercapainya target indikator Persentase lalu lintas angkutan jalan yang berkeselamatan. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran pengguna jalan, dimana alokasi anggaran yang dipergunakan untuk melakukan penindakan belum cukup efektif untuk menimbulkan efek jera.
 - c. Tidak tercapainya target indikator Terwujudnya peningkatan pelayanan angkutan. Hal ini disebabkan oleh

tingkat pengurusan perijinan yang kurang patuh dan paham prosedur pengurusan perijinan.

Review Terhadap Pelaksanaan Renja Tahun 2022

Mengacu pada dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2022, dalam tahun anggaran berjalan belum dapat teramati dengan baik, mengingat pelaksanaan Program/Kegiatan sebagian besar belum berjalan. Namun dapat dikatakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2022 sudah mengakomodasi isi atau muatan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) tahun 2022.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Mengacu pada realisasi anggaran Belanja Langsung pada tahun 2022, secara umum dapat digambarkan bahwa pelaksanaan Program/Kegiatan dapat berjalan dengan baik. Beberapa kegiatan prioritas dapat terlaksana walaupun dengan kondisi yang kurang ideal. Pencapaian kinerja daripada Renja Tahun 2022 seperti pada tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya Infrastruktur Perhubungan yang memadai	Persentase lintasan keretaapi wilayah sarbagita yang mendapatkan kepastian pembiayaan	50	50	100%
Terwujudnya Transportasi yang lancar	Rasio konektivitas layanan angkutan	0,78	0,78	100%
	Indeks kepuasan terhadap kinerja sistem Transportasi Bali	75	82	100%
	Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100Km dari KSP menuju jalan nasional	50%	50%	100%
	Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang Operasionalnya menerapkan SPM	25%	25%	100%
Terwujudnya Transportasi yang berkeselamatan	Persentase terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum angkutan	66,35	66,35	90%
Terwujudnya Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,99	83,82	100%

Dinas Perhubungan Provinsi Bali dalam pelayanan kepada publik memiliki SOP dan SPM. SOP pada pelayanan perijinan telah dijalankan dengan baik sesuai prosedur standar dan melayani 100% penatalaksanaan perijinan yang masuk. Sedangkan pada SPM Dinas Perhubungan telah menerapkan pada layanan Angkutan Umum Trans Sarbagita, dimana SPM sendiri telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Capaian kinerja dari penerapan SPM Trans Sarbagita dapat dilihat dari pencapaian tingkat pelayanan angkutan Trans Sarbagita itu sendiri, dimana pada tahun 2022 dari target sebesar 75% tercapai 82%.

2.3 Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

a. Beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota memiliki karakteristik yang sama. Isu – isu seperti keselamatan berlalu lintas, tingkat pelayanan ruas jalan, tingkat pelayanan angkutan umum, pemenuhan infrastruktur Perhubungan masih menjadi isu yang diangkat dan belum mendapat perhatian khusus.

Selaras dengan isu tersebut, beberapa juga merupakan isu yang diangkat ketingkat nasional oleh Kementerian Perhubungan, sehingga terjadi sinergitas Program baik dari tingkat Pusat, Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota.

b. Permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah selain minimnya alokasi anggaran dalam pemenuhan kebutuhan, juga berasal dari beberapa permasalahan kewenangan yang belum diselesaikan serta permasalahan payung hukum yang belum jelas.

Dampaknya bila permasalahan itu tidak diselesaikan maka pemenuhan target kinerja yang berasal dari visi dan misi kepala daerah akan menjadi terganggu dan cenderung tidak terpenuhi. Sehingga diperlukan penelaahan yang lebih mendalam.

- c. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah.

Saat ini Perangkat Daerah terus diminta untuk berinovasi terhadap peningkatan pelayanan kepada publik, melalui program-program kemasyarakatan dan program-program prioritas teknis yang akan memberikan dampak makro yang positif kepada masyarakat. Peluang untuk mewujudkan transportasi publik dan diharapkan dapat berkelanjutan, sedangkan pengembangan potensi lainnya seperti penyediaan infrastruktur penunjang transportasi Bali seperti Pelabuhan, Bandar Udara dan Terminal dapat dijadikan sebagai peluang untuk mewujudkan pelayanan transportasi yang handal.

2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Secara umum isi daripada Rancangan Akhir RKPD sudah dianalisis berdasarkan analisis kebutuhan, dimana usulan Program/Kegiatan yang ada didalam RKPD telah terakomodasi dengan baik pada Renja Perangkat Daerah.

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Prog/Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Prog/Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	Denpasar	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84	13.833.153.134	Program Penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	Denpasar	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84	32.553.522.029	
2	Program Pengelolaan Keretaapian	9 Kab./Kota	Persentase lintasan keretaapi wilayah sarbagita yang mendapatkan kepastian pembiayaan	50	1.000.000.000	Program Pengelolaan Keretaapian	9 Kab./Kota	Persentase lintasan keretaapi wilayah sarbagita yang mendapatkan kepastian pembiayaan	50	2.400.000.000	
3	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	9 Kab./Kota	Rasio Konektivitas layanan angkutan	0,84	1.000.000.000	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	9 Kab./Kota	Rasio Konektivitas layanan angkutan	0,84	1.000.000.000	
			Persentase terpenuhinya standar	72,51	1.177.000.000			Persentase terpenuhinya standar	72,51	1.377.000.000	

			pelayanan minimum angkutan					pelayanan minimum angkutan				
			Indeks kepuasan terhadap kinerja sistem Transportasi Bali	79	6.500.000.000			Indeks kepuasan terhadap kinerja sistem Transportasi Bali	79	7.020.000.000		
			Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100km dari KSP menuju jalan nasional	65	3.873.372.384			Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100km dari KSP menuju jalan nasional	65	4.088.372.200		
4	Program Pengelolaan Pelayaran	9 Kab./Kota	Persentase pelabuhan pengumpan regional yang operasionalnya menerapkan SPM	50	3.710.000.000	Program Pengelolaan Pelayaran	9 Kab./Kota	Persentase pelabuhan pengumpan regional yang operasionalnya menerapkan SPM	50	26.110.000.000		

Dari 4 program yang diusulkan dalam usulan akhir RKPD secara keseluruhan dapat terakomodasi. Namun dari pembiayaan yang diusulkan dalam usulan akhir RKPD belum dapat secara utuh terpenuhi mengingat keterbatasan keuangan Daerah, sehingga diperlukan analisa yang lebih mendalam terhadap Program/Kegiatan yang diprioritaskan untuk mendukung Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan Akhir Renja Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tahun 2024 sesuai Permendagri 90 Tahun 2020, akan disampaikan pada Forum Perangkat Daerah yang akan diikuti oleh Seluruh Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota se Bali dan Instansi vertikal / Balai Kementerian Perhubungan di Provinsi Bali, Bapeda Provinsi Bali, Instansi terkait, tokoh – tokoh masyarakat Transportasi, kalangan akedemisi, kelompok ahli dan Organisasi transportasi di Bali. Usulan dan masukan dari peserta forum selanjutnya akan ditelaah sehingga rancangan awal renja akan dapat mengakomodasi segala kebutuhan masyarakat terkait transportasi di Provinsi Bali.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional Dinas Perhubungan Provinsi Bali mengacu pada Prioritas Nasional Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah. Secara teknis juga telah mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024.

Mendasari kondisi tersebut ditetapkan visi Kementerian Perhubungan adalah **“Terwujudnya Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah”**. Hal tersebut merupakan cita-cita Kementerian Perhubungan dimana konektivitas merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah. **Konektivitas Nasional** adalah terhubungnya antar wilayah di seluruh nusantara termasuk angkutan perkotaan baik dengan transportasi darat, kereta api, laut, sungai dan penyeberangan serta udara.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Dinas Perhubungan mengacu pada RPD Semesta Berencana Provinsi Bali 2024-2026 secara lebih detail, terinci, lebih tergambar dengan jelas yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja pembangunan secara keseluruhan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam Menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Adapun tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan : Terwujudnya Transportasi yang Handal untuk Pelayanan Kelas Dunia dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kepuasan Transportasi (Aman, Nyaman, Selamat, dan Terjangkau)

Sasaran : Terwujudnya Kualitas Pelayanan Transportasi di

- Provinsi Bali dengan Indikator Rasio Konektivitas Layanan Transportasi Bali (Rasio Konektivitas)
- : Terwujudnya Kualitas Layanan Transportasi di Provinsi Bali dengan Indikator Indek Kepuasan Layanan Transportasi (Indek)
 - : Meningkatnya Keselamatan Transportasi Bali dengan Indikator Persentase Kecelakaan di Provinsi Bali (%)

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, bersifat idealistik dan mengandung nilai – nilai keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan merupakan arah perjalanan pemerintah dan pembangunan yang jelas berdasarkan kriteria – kriteria, akseptibilitas, aksesibilitas dan kewenangan yang mudah dipahami seluruh masyarakat.

Sedangkan sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan yakni suatu yang akan dicapai berdasarkan kebijakan, alokasi sumber daya, program dan kegiatan yang ditetapkan untuk jangka waktu tertentu yakni tahunan dan lima tahunan.

Agar tujuan yang diharapkan dapat dicapai, maka sasaran yang ditetapkan harus bersifat spesifik, terukur, akuntabel dan menantang, tetapi dapat dilaksanakan dan berorientasi pada hasil sesuai sumber daya yang tersedia, tugas dan fungsi unit kerja. Dalam mendukung pencapaian RPD maka Dinas Perhubungan Provinsi Bali juga menentukan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Perangkat sebagai berikut:

- Tujuan 1 : Terwujudnya Transportasi yang Handal untuk Pelayanan Kelas Dunia
- Sasaran 1 : Terwujudnya Konektivitas Pelayanan Transportasi di Provinsi Bali
- Sasaran 2 : Terwujudnya Kualitas Layanan Transportasi di Provinsi Bali
- Sasaran 3 : Meningkatnya Keselamatan Transportasi Bali

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH						
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI						
TAHUN 2024-2026						
No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE		
				1	2	3
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Transportasi yang Handal untuk Pelayanan Kelas Dunia	Terwujudnya Konektivitas Pelayanan Transportasi Provinsi Bali	Persentase lintasan keretaapi yang terbangun	25%	35%	45%
			Rasio Konektivitas Angkutan Darat	0,86	0,88	0,90
			Persentase Aksesibilitas Pelayanan	75	80	84
		Terwujudnya Kualitas Layanan Transportasi di Provinsi Bali	Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100 km dari KSP menuju jalan nasional	65	66	66,5
			Persentase terpenuhinya standar pelayanan minimum angkutan	73	73,45	73,85
			Indeks kepuasan layanan angkutan Trans Bali/Trans Sarbagita	82,5	83	83,5
			Persentase Pelabuhan pengumpan regional yang operasionalnya menerapkan SPM	50	50	75
		Meningkatnya Keselamatan Transportasi Bali	Persentase sarana dan prasarana keselamatan lalulintas dan angkutan jalan dalam kondisi baik	38,58	43,75	49,48
		Terwujudnya Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,85	83,90	84

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan visi misi Kepala Daerah Provinsi Bali Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 merencanakan 4 Program, 15 Kegiatan dan 32 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi (Dinas)

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 3.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 3.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - 3.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 4.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 4.2 Pengadaan Mebel
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- 5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
- 5.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinth Daerah
 - 6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 6.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 6.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- A.2 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi (UPTD. P2LLAJ)
 - 1. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.4 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - 2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 2.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 3.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 3.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

A.3 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi (UPTD. TRANS BALI/TRANS SARBAGITA)

1. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 1.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 1.4 Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan
- 1.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 1.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 2.1 Pengadaan Mebel

3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 3.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 3.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 4.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 4.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

A.4 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi (UPTD. PERLENGKAPAN JALAN)

1. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.2 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 2.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 3.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 3.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

A.5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi (UPTD. PENYELENGGARAAN PELABUHAN)

1. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.2 Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
 - 1.3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan
 - 1.4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
 - 2.1 Pengadaan Mebel
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 3.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 4.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 4.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

B. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

1. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi
 - 1.1 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi
 - 1.2 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi
 - 1.3 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi
2. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi
 - 2.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
 - 2.2 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin
3. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.1 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi
4. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - 4.1 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
5. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- 5.1 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- 6. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
 - 6.1 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
 - 6.2 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

C. Program Pengelolaan Pelayaran

- 1. Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional
 - 1.1 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional
- 2. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
 - 2.1 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional

D. Program Perkeretaapian

- 1. Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian
 - 1.1 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian

Dinas Perhubungan dalam usulan Belanja Langsung dalam Renja Tahun 2024 mengusulkan 4 Program dan 15 Kegiatan dengan 32 Sub Kegiatan yang tersebar pada Sekretariat, Bidang dan UPTD. Sebaran lokasi pelaksanaan Program/Kegiatan teknis secara umum tersebar pada 9 Kabupaten/Kota sesuai usulan berdasarkan kewenangan serta lingkup koordinasi. Sedangkan Program/Kegiatan rutin perkantoran berlokasi di Denpasar.

Berikut Rekapitulasi usulan pagu Program/Kegiatan pada Sekretariat, Bidang dan UPTD dilingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Bali yang diusulkan dalam Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tahun 2024.

No.	Bidang/UPTD	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	Sekretariat 58%	1	6	18	23.906.479.331
2	Bidang Lalu Lintas 2%	1	2	4	621.152.099
3	Bidang Angkutan 2%	1	2	2	900.459.368
4	Bidang Keterpaduan Moda 1%	1	1	1	497.408.576
5	Bidang Pelayaran 2%	1	1	1	905.389.976
6	UPTD. Pusat Pengendalian LLAJ 6%	2	4	11	2.557.882.088
7	UPTD. Trans Bali / Trans Sarbagita 21%	2	4	12	8.490.561.152
8	UPTD. Perlengkapan Jalan 5%	2	4	7	2.049.428.864
9	UPTD. Penyelenggaraan Pelabuhan 3%	2	5	9	1.116.139.460
JUMLAH					41.044.900.914

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja Program Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari arah kebijakan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Bali 2024-2026, maka rencana kerja program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 mengacu pada Pemendagri 90 Tahun 2019 mengampu 4 Program yang dilaksanakan oleh 9 Bidang di Dinas Perhubungan Provinsi Bali, adalah terdiri dari :

1. Program Penunjang urusan pemerintahan Daerah Provinsi Bali dilaksanakan oleh Bidang Sekretariat dan bagian Katata Usahaan pada masing – masing UPTD.

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Tahun 2025
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sum ber Dana	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase peningkatan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali	Denpasar	100%	25.823.354.863	APBD	26.773.450.000

- 2 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dilaksanakan oleh 6 kegiatan dimana 4 kegiatan di bidang dan 2 kegiatan di UPTD di Dinas Perhubungan Provisi Bali yaitu Bidang Angkutan Jalan, Lalu Lintas Jalan, UPTD. Perlengkapan Jalan, UPTD Pusat Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan dan UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita dengan atau diampu oleh 6 kegiatan yaitu:

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Tahun 2025
		Loka si	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Rasio Konektivitas Layanan Angkutan	9 Kab./ Kota	0,78 Rasio	2.175.140.857	APBD	2.200.000.000
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Persentase Pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100km dari KSP menuju jalan Nasional	9 Kab./ Kota	50%	86.665.026	APBD	90.000.000
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya standar pelayanan minimum angkutan	9 Kab./ Kota	72,51%	489.472.800	APBD	550.000.000
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase terpenuhinya standar pelayanan minimum angkutan	9 Kab./ Kota	72,51%	410.986.568	APBD	550.000.000
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Sistem Transportasi Bali (Angkutan Umum Trans SARBAGITA)	9 Kab./ Kota	75%	7.871.705.480	APBD	8.500.000.000

Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Tingkat pelayanan ruas jalan	9 Kab./ Kota	C (kecepatan rata-rata 60 km/jam, kepadatan lalu lintas sedang)	2.323.506.768	APBD	2.600.000.000
--	---------------------------------	--------------------	---	---------------	------	---------------

Rincian sub kegiatan yang akan mendukung Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi.
2. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi.
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin.
4. Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin.
5. Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi.
6. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
7. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi.
8. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
9. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi.
10. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan.

3 Program Pengelolaan Pelayaran akan dilaksanakan oleh 2 (dua) bidang yaitu Bidang Pelayaran dan UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan, indikator program yang akan menjawab Program Pengelolaan Pelayaran dengan rencana kebutuhan anggaran pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Tahun 2025
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase pelabuhan pengumpan regional yang operasionalnya menerapkan SPM	9 Kab./ Kota	50%	905.389.976	APBD	1.000.000.000
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase pelabuhan pengumpan regional yang operasionalnya menerapkan SPM	9 Kab./ Kota	50%	461.270.000	APBD	500.000.000

Rencana sub kegiatan yang mendukung terwujudnya Program Pengelolaan Pelayaran pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional.
2. Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional.

4 Program Pengelolaan Perkeretaapian diampu oleh 1 bidang keterpaduan moda dengan kegiatan pada tahun 2024 masih sebatas kajian – kajian dan koordinasi untuk mewujudkan transportasi menggunakan keretaapi diprovinsi Bali. Adapun indikator program dan rencana kebutuhan pagu yang akan di perlukan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Tahun 2025
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Persentase lintasan keretaapi wilayah sarbagita yang mendapatkan kepastian pembiayaan	9 Kab./ Kota	50%	497.408.576	APBD	600.000.000

Rencana sub kegiatan untuk mewujudkan Program Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian.

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Dengan telah disusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja Tahunan Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tahun 2024, kiranya dapat dipergunakan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dapat dipertanggung jawabkan secara transparan dan terukur baik kuantitatif maupun kualitatif.

Mengingat sangat kompleksnya visi, misi dan tujuan yang hendak dicapai, sedangkan kewenangan Provinsi pada bidang perhubungan masih sangat sedikit, maka kebijakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan akan mencapai sasaran dengan baik jika ada dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak. Dukungan dalam bentuk kebijakan dan penganggaran sangat diharapkan untuk mewujudkan pencapaian sasaran.

Dukungan penganggaran terhadap Program Prioritas dan pendukung keberhasilan pencapaian sasaran sangat diharapkan dapat konsisten dipertahankan, sehingga target dapat tercapai.

Dengan adanya dukungan dan partisipasi masyarakat secara luas, maka diharapkan pelayanan jasa perhubungan dapat dilaksanakan dengan lancar, tertib, teratur, aman, nyaman dan menjangkau keseluruhan wilayah sehingga mampu menunjang pembangunan Bali secara keseluruhan dan berkelanjutan.

5.2 Kaidah – kaidah pelaksanaan

Pelaksanaan Perencanaan Anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tahun 2024 mengacu pada Tata cara yang tertuang dalam Pemandagri nomor 90 Tahun 2019. Penyusunan Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Bali mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Bali 2024-2026 sesuai dengan prioritas sasaran.

5.3 Rencana Tindaklanjut

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Dinas Perhubungan Provinsi Bali, diharapkan mendapatkan gambaran untuk dijadikan salah satu referensi dalam penentuan pagu indikatif Dinas Perhubungan yang sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran.

LAMPIRAN

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			4	5	6	7	NASIONAL	DAERAH		8	9	
	DINAS PERHUBUNGAN			26.830.889.350,00							28.077.500.000,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			26.830.889.350,00							28.077.500.000,00	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			26.830.889.350,00							28.077.500.000,00	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai Evaluasi Kinerja</i>	83,85	23.906.479.331,00	83,85	Person					24.737.500.000,00	
2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	94.679.800,00					6. Infrastruktur	Aparatur	67.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	51.727.400,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Denpasar Puri Kelod		PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)		6. Infrastruktur	Aparatur	43.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	42.952.400,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Denpasar Puri Kelod		PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur	24.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen gaji, tunjangan dan administrasi penyediaan perlengkapan kantor	2 Dokumen	18.696.021.383,00					6. Infrastruktur	Aparatur	19.030.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	96 Orang/ Bulan	18.667.814.283,00	Kota Denpasar, Kecamatan, Semua Kel/Desa		DANA TRANSFER UMLM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur	19.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	28.407.100,00	Kota Denpasar, Kecamatan, Semua Kel/Desa		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur	30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	6 Dokumen	1.346.716.500,00					6. Infrastruktur	Aparatur	1.598.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.489.000,00	Kota Denpasar, Kecamatan, Semua Kel/Desa		PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur	7.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	916.029.700,00	Kota Denpasar, Kecamatan, Semua Kel/Desa		PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur	1.100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	80.000.000,00	Kota Denpasar, Kecamatan, Semua Kel/Desa		PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.303.300,00	Kota Denpasar, Kecamatan, Semua Kel/Desa		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur	9.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	25.202.500,00	Kota Denpasar, Kecamatan, Semua Kel/Desa		PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur	32.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	311.692.000,00	Kota Denpasar, Kecamatan, Semua Kel/Desa		PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur	350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	2 Dokumen	627.681.000,00					6. Infrastruktur	Aparatur	670.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	9 Unit	325.036.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)			6. Infrastruktur	Aparatur	350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	55 Paket	302.645.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)			6. Infrastruktur	Aparatur	320.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	3 Dokumen	616.323.164,00				Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur	702.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.500.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur	2.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	245.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur	300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	369.823.164,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur	400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	3 Dokumen	2.525.057.484,00				Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur	2.670.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	20 Unit	1.005.963.584,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur	1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	68.774.400,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur	70.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1.450.319.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur	1.600.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGGUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio konektivitas layanan angkutan darat	0,86 Rasio	1.521.611.467,00							1.740.000.000,00	
2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekrayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Peningkatan Keselamatan Pengguna Jaringan jalan	2 Laporan	534.487.073,00				Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	560.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	1 Laporan	361.160.462,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.1.05.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan	173.326.611,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
			NASIONAL		DAERAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2.15.02.1.06	Peretujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalin) untuk Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk Jalan Provinsi yang ditindaklanjuti	13 Laporan	86.665.026,00				Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	-	90.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.1.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalin	8 Laporan	43.333.512,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	-	45.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.02.1.06.0004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalin yang Terawasi	8 Laporan	43.331.514,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	-	45.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.02.1.10	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan Yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	489.472.800,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	-	560.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.02.1.10.0004	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	3000 Dokumen	489.472.800,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	-	560.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	410.986.568,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	-	550.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.02.1.13.0001	Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	10 Unit	410.986.568,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	-	560.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYANAN	Persentase Aksesibilitas Pelayanan	75 Persen	905.389.976,00							-	1.000.000.000,00	
2.15.03.1.08	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelembutan Pengumpulan Regional	Jumlah dokumen kajian	1 Dokumen	905.389.976,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	-	1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.03.1.08.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelembutan Pengumpulan Regional	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelembutan Pengumpulan Regional	1 Dokumen	905.389.976,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	-	1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase lintasan kereta api yang terbangun	25 Persen	497.408.576,00							-	600.000.000,00	
2.15.05.1.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen	497.408.576,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	-	600.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.05.1.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen	497.408.576,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	-	600.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				2.557.882.088,00							2.619.000.000,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERSIKUTAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.557.882.088,00							2.619.000.000,00	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			2.557.882.088,00							2.619.000.000,00	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Milai Evaluasi Kinerja	83,65 Persen	328.720.704,00							369.000.000,00	
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	136.179.712,00				Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur	154.800.000,00	LPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
2.15.01.1.06.0001	Perediaan Komponen Instalasi Listrik/Perenerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Perenerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.650.812,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur	4.000.000,00	LPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ	
2.15.01.1.06.0002	Perediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	90.693.300,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur	100.000.000,00	LPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ	
2.15.01.1.06.0005	Perediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	719.600,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur	800.000,00	LPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ	
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	40.916.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur	50.000.000,00	LPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ	
2.15.01.1.08	Perediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Perediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	43.116.496,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur	48.200.000,00	LPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ	
2.15.01.1.08.0001	Perediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Perediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.197.800,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur	2.500.000,00	LPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ	
2.15.01.1.08.0002	Perediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Perediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur	700.000,00	LPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ	
2.15.01.1.08.0004	Perediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Perediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	40.918.696,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur	45.000.000,00	LPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ	
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit	149.424.496,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur	166.000.000,00	LPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ	
2.15.01.1.09.0001	Perediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	138.134.496,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur	150.000.000,00	LPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ	
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	11.290.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur	16.000.000,00	LPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100km dari KSP menuju jalan nasional	65 Persen	2.229.161.384,00							2.250.000.000,00	
2.15.02.1.02	Perediaan Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	14 Unit	588.507.600,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	600.000.000,00	LPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ	
2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	14 Unit	588.507.600,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	600.000.000,00	LPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ	
2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	6 Laporan	1.640.653.784,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	1.650.000.000,00	LPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ	
2.15.02.1.05.0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan	1.640.653.784,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	1.650.000.000,00	LPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA			8.490.561.152,00							9.138.050.000,00		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			8.490.561.152,00							9.138.050.000,00		
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			8.490.561.152,00							9.138.050.000,00		
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Kinerja	83,85 Persen	618.855.672,00							638.050.000,00		
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia	1 Tahun	188.469.000,00					Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6 Infrastruktur	Aparatur	198.600.000,00	UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	964.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6 Infrastruktur	Aparatur			1.100.000,00	UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	99.215.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6 Infrastruktur	Aparatur			100.000.000,00	UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA
2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6 Infrastruktur	Aparatur			27.000.000,00	UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	14.999.600,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6 Infrastruktur	Aparatur			17.000.000,00	UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA
2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.988.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6 Infrastruktur	Aparatur			3.500.000,00	UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	45.302.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6 Infrastruktur	Aparatur			50.000.000,00	UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Jumlah kursi yang disediakan	10 Unit	13.740.000,00					Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6 Infrastruktur	Aparatur	15.000.000,00	UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA
2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	13.740.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6 Infrastruktur	Aparatur			15.000.000,00	UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	57.102.296,00					Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6 Infrastruktur	Aparatur	60.450.000,00	UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA
2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	396.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6 Infrastruktur	Aparatur			450.000,00	UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	17.700.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6 Infrastruktur	Aparatur			18.000.000,00	UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	39.006.296,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6 Infrastruktur	Aparatur			42.000.000,00	UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan AC, Komputer (PC), Laptop, Printer dan kendaraan yang tersedia	25 Unit	359.544.376,00					Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6 Infrastruktur	Aparatur	364.000.000,00	UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	346.434.376,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6 Infrastruktur	Aparatur			350.000.000,00	UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 Unit	13.110.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6 Infrastruktur	Aparatur			14.000.000,00	UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGGUTAN JALAN (LLAJ)	Indeks kepuasan layanan angkutan Trans Bali/Trans SARBAGITA	82,5 Persen	7.871.705.480,00							8.500.000.000,00	
2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Jasa Layanan Angkutan Umum Trans SARBAGITA	7332 RIT	7.871.705.480,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur		8.500.000.000,00	UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA
2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	10 Unit	7.871.705.480,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur		8.500.000.000,00	UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	UPTD PERLENGKAPAN JALAN			2.049.428.864,00							2.344.000.000,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.049.428.864,00							2.344.000.000,00	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			2.049.428.864,00							2.344.000.000,00	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai Evaluasi Kinerja</i>	83,85 Persen	314.429.696,00							344.000.000,00	
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor yang disediakan, Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dokumen	35.232.000,00				Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur	39.000.000,00	UPTD PERLENGKAPAN JALAN
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.091.800,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		7.000.000,00	UPTD PERLENGKAPAN JALAN
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22 Laporan	29.140.200,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		32.000.000,00	UPTD PERLENGKAPAN JALAN
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	24 Unit	129.951.500,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		150.000.000,00	UPTD PERLENGKAPAN JALAN
2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	23 Unit	129.951.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		150.000.000,00	UPTD PERLENGKAPAN JALAN
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara, Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	15 Unit	149.246.196,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		155.000.000,00	UPTD PERLENGKAPAN JALAN
2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	140.926.196,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		145.000.000,00	UPTD PERLENGKAPAN JALAN
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	8.320.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		10.000.000,00	UPTD PERLENGKAPAN JALAN
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	<i>Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kondisi baik</i>	38,58 Persen	1.734.999.168,00							2.000.000.000,00	
2.15.02.1.02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia Jumlah Perengkapan Jalan yang Terhabilitas dan Terpelihara	388 Unit 760 Unit	1.734.999.168,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur		2.000.000.000,00	UPTD PERLENGKAPAN JALAN
2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	363 Unit	1.134.999.684,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur		1.350.000.000,00	UPTD PERLENGKAPAN JALAN
2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terhabilitas dan terpelihara	998 Unit	599.999.484,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur		650.000.000,00	UPTD PERLENGKAPAN JALAN

KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN			1.116.139.460,00							1.184.900.000,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.116.139.460,00							1.184.900.000,00	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			1.116.139.460,00							1.184.900.000,00	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Kinerja	83,85 Persen	654.869.460,00							684.900.000,00	
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran	1 Dokumen	496.372.060,00					6. Infrastruktur	Aparatur	552.200.000,00	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Penghimpunan Kantor											
		Jumlah Paket Peralatan dan Penghimpunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	85.272.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		76.000.000,00	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan											
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.496.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		3.000.000,00	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan											
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.540.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		3.200.000,00	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	405.063.960,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		470.000.000,00	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Misk Daerah Penunjang Urutan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan Kantor yang disediakan	13 Unit	37.797.400,00					6. Infrastruktur	Aparatur	25.000.000,00	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel											
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	37.797.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		25.000.000,00	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urutan Pemertintahan Daerah	Jumlah material tersedia untuk administrasi perkantoran	150 Lembar	1.800.000,00					6. Infrastruktur	Aparatur	1.700.000,00	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		1.700.000,00	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Misk Daerah Penunjang Urutan Pemertintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan AC, Komputer (PC), Laptop, Printer dan kendaraan yang tersedia	10 Unit	118.900.000,00					6. Infrastruktur	Aparatur	108.000.000,00	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinasnya	2 Unit	113.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		100.000.000,00	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		6.000.000,00	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
2.15.03	PROGRAM PENGELUARAN PELAYARAN	Persentase Pelabuhan Pengumpulan Regional yang Operasionalnya menerapkan SPM	50 Persen	461.270.000,00							500.000.000,00	
2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Regional	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Regional	19 Laporan	461.270.000,00					6. Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	500.000.000,00	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
2.15.03.1.09.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Regional											
		Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Regional	19 Laporan	461.270.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur		500.000.000,00	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN